



Analisis Konsekuensi Pengambilan Keputusan Pemerintah terhadap Pemindahan Ibu Kota ke IKN melalui Pendekatan Fishbone

Vika Armelya Putri^{1*}, Adelia Safira², M. Noer Falaq Al Amin³

^{1,2,3} Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia; vika.22142@mhs.unesa.ac.id, adelia.22119@mhs.unesa.ac.id, noerfalaqalamin@unesa.ac.id

Abstrak: Indonesia saat ini sedang dalam proses pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru yang terletak di Kalimantan Timur. Memindahkan ibu kota bukanlah keputusan yang mudah. Proses pengambilan keputusan untuk memindahkan ibu kota harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan pihak lain yang memiliki kepentingan yang berbeda. Keputusan ini juga harus mempertimbangkan berbagai risiko yang ada dan konsekuensi yang mungkin timbul, baik dari segi ekonomi, sosial, lingkungan, maupun politik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah membuat keputusan yang lebih baik dan mempertimbangkan dengan hati-hati beberapa aspek dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan. Dalam melakukan analisis konsekuensi, para peneliti menggunakan pendekatan fishbone untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan keputusan untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa penyebab dari segi ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan untuk pemindahan ibu kota kepulauan ke Kalimantan Timur. Dampak yang timbul termasuk peningkatan pendapatan daerah, perubahan budaya dan sosial dalam masyarakat, potensi deforestasi, dan perubahan dalam dinamika politik nasional. Dari analisis ini, peneliti memberikan saran untuk perencanaan yang hati-hati, manajemen yang baik, dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan untuk meminimalkan berbagai dampak negatif yang terjadi.

Katakunci: IKN; Pengambilan Keputusan; Analisis Fishbone; Pemindahan Ibu Kota Negara.

DOI:

<https://doi.org/10.47134/par.v1i2.2393>

*Correspondensi: Vika Armelya Putri

Email: vika.22142@mhs.unesa.ac.id

Received: 07-12-2023

Accepted: 14-01-2024

Published: 25-02-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Indonesia is currently in the process of developing a new Indonesian Capital City (IKN) located in East Kalimantan. Moving the capital was not an easy decision. The decision-making process to move the capital city must involve various stakeholders and other stakeholders who have different interests. This decision must also consider the various risks that exist and the consequences that may arise, both from an economic, social, environmental and political perspective. The aim of this research is to help the government make better decisions and take careful consideration regarding several aspects in the context of sustainable development. In conducting a consequence analysis, researchers used a fishbone approach to identify the factors that caused the decision to move the capital city to Kalimantan. The research results show that there are several causes from economic, social, political and environmental aspects for the transfer of the capital city of the archipelago to East Kalimantan. The impacts that arise include increasing regional income, cultural and social changes in society, the potential for deforestation and changes in national political dynamics. From this analysis, the researcher provides suggestions for careful planning, good management, and active participation from various stakeholders to minimize the various negative impacts that occur.

Keywords: IKN; Decision Making; Fishbone Analysis, Moving the National Capital.

Pendahuluan

Pemindahan ibu kota negara merupakan keputusan yang sangat strategis dimana hal ini dapat memunculkan dampak jangka panjang yang signifikan dari beberapa aspek

kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan populasi dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, dan dihadapkan dengan tantangan ibu kota yang saat ini semakin padat.

Pemerintah sulit mengendalikan pertumbuhan dan jumlah penduduk karena ukuran kota tidak dapat mengimbangi laju pertumbuhan. Hal ini dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas, polusi, peningkatan kejahatan, migrasi massal, dan tingginya tingkat kematian di kota-kota besar. Salah satu opsi untuk pembangunan perkotaan baru adalah penciptaan kota (Sahamony et al., 2020).

Indonesia kini dalam proses agenda pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru yang terletak di Kalimantan Timur. Agenda ini dimulai sejak 26 Agustus 2019, dimana Presiden Joko Widodo mengumumkan pemindahan ibukota negara ke Provinsi Kalimantan Timur (Silahahi, 2019). Letak IKN yang ada di tengah Indonesia harapannya bisa mewujudkan keadilan dan pemerataan ekonomi juga pembangunan (Hadi & Ristawati, 2020). Pemindahan Ibu Kota dilakukan dilatarbelakangi oleh berbagai hal, salah satunya terkait padatnya jumlah penduduk yang ada di Pulau Jawa saat DKI Jakarta menjadi Ibu Kota Negara (Absor et al., 2023). Selain itu, berdasar pemodelan dari kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilaksanakan Bappenas menunjukkan jika pulau Jawa sudah terjadi berbagai konversi ataupun perubahan fungsi lahan. Pemodelan inilah menyatakan apabila ada proporsi yang tak berimbang saat Jawa lima kali lipat dari Pulau Kalimantan mengenai pemanfaatan lahan dalam kebutuhan konsumsi (Purnama & Chotib, 2022). Kemudian terkait dengan kondisi lingkungan DKI Jakarta dan sekitarnya yang rawan terhadap longsor, banjir, polusi, abrasi air laut, yang begitu serius di banyak sungai, ataupun tentang macetnya lalu lintas (Taufiq, 2020).

Walaupun pemindahan ibukota negara ke Kalimantan Timur dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang saat ini terjadi sebagaimana telah diuraikan pada paragraf sebelumnya, tetapi pemindahan ini juga menimbulkan sejumlah konsekuensi (Ahmed, 2020). Konsekuensi tersebut, diantaranya bidang ekonomi yang berpengaruh terhadap inflasi. Ikatan Pengusaha Real Estate Indonesia (REI) membuat perkiraan meingkatnya inflasi. REI memperkirakan kontribusi inflasi paling besar asalnya dari kenaikan harga lahan, terlebih lagi ada luasan lahan yang kekuasaannya hanyalah dari beberapa pihak. Adanya para spekulasi juga bisa memperbesar kemungkinan naiknya harga lahan dengan tak terkendali. Kemudian, terkait pembiayaan untuk keperluan pemindahan ibukota negara yang ditaksir mencapai ratusan triliun (Hasibuan & Aisa, 2020). Selain itu, pemindahan ibukota negara juga berdampak kepada aspek sosial. Aspek sosial tersebut, diantaranya cara hidup, struktur masyarakat, dan aspek sosial budaya (Aji et al., 2023).

Perlu diingat bahwa 59,5% dari wilayah IKN adalah hutan dan habitat satwa endemik yang harus dilindungi. Pasti ada dampak langsung atau tidak langsung dari pembangunan IKN terhadap habitat satwa dan lingkungan alam sekitar. Pemerintah harus menyadari fakta apabila penebangan hutan di hulu dan sedimentasi sungai yang disebabkan oleh aktivitas penambangan menyebabkan kerusakan beberapa daratan serta

yang memiliki potensi menyebabkan banjir besar. Secara fakta, banjir telah ada di lokasi tersebut sekarang. Maka terdapat kemungkinan bencana kabut asap di lokasi IKN, di mana 1.106 titik panas api menyebabkan kebakaran hutan dan lahan seluas 6.715 ha di tahun 2019. Sebab pemindahan IKN bisa membuat dampak serius pada kerusakan lingkungan, gangguan habitat flora dan fauna, kerusakan keanekaragaman hayati, kerusakan ekosistem mangrove, serta kerusakan kawasan hutan, keabsahan dan kualitas penelitian lingkungan yang dilakukan di wilayah IKN ini harus dipertanyakan (Wind, 2019). Kawasan IKN yang terletak antara hutan konservasi Taman Hutan Rakyat Bukit Suharto, Hutan Lindung Sungai Wain dan Hutan Lindung Manggar bisa menimbulkan ancaman ketersediaan sumber air. Ini akan membuat makin parahnya krisis sumber air serta pastinya akan mengancam kawasan konservasi serta hutan Teluk Balikpapan (Muhlashin, 2023). Akibatnya, analisis lebih lanjut diperlukan.

Keputusan tentang pemindahan ibu kota memerlukan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan tujuannya yang tidaklah sama (Dong, 2022). Sementara, untuk membuat keputusan ini, seseorang harus mempertimbangkan berbagai resiko yang ada dan konsekuensi yang mungkin timbul dari segi ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan.

Dalam konteks ini, analisis konsekuensi pengambilan keputusan pemerintah terhadap pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Negara (IKN) menjadi hal yang krusial untuk dibahas. Studi ini tidak hanya memberikan pengetahuan mendalam terkait dampak pemindahan ibu kota, namun juga akan membantu pemerintah dalam menentukan keputusan yang lebih baik dan pertimbangan matang terkait beberapa aspek dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

Pengambilan Keputusan

Keputusan ialah perilaku organisasi yang berbasis pada perilaku individu serta pada gambaran proses keputusan ini dengan relatif serta bisa diaebut apabila pengertian tingkah laku organisasi lebih penting dari kepentingan individu. (Malliaris, 2021) Satu di antara kegiatan manajemen yang terpenting ialah memahami sistem sedalam-dalamnya supaya membuat keputusan yang sesuai bisa memperbaiki hasil sistem secara keseluruhan pada jangka waktu khusus. Oleh karena itu, pengambilan keputusan ialah sebuah proses memilih alternatif terbaik dari banyak pilihan kualitatif ataupun kuantitatif dalam menyelesaikan masalah ataupun konflik (Sudjiman & S., 2018).

George (1977) dan Chester. (1992) menyatakan apabila proses penurunan sebuah keputusan terdapat empat unsur:

1. Model, model menjelaskan gambaran sebuah masalah baik dengan kuantitatif maupun kualitatif.
2. Keputusan, kriteria yang dirumuskan memperlihatkan tujuan dari keputusan yang ditetapkan. (Reading, 2021) Apabila ada berbagai kriteria yang saling bertentangan, maka pengambilan keputusan harus dengan kompromi (seperti menambah jasa langganan dan mengurangi persediaan, demikian keputusan mana yang disahkan harus kompromi).

3. Pembatas, faktor—faktor lainnya yang harus diperhatikan untuk memecahkan masalah pengambilan keputusan. Seperti dana yang ada sedikit.
4. Optimalisasi, jika masalah keputusan sudah dijabarkan dengan secara jelas, maka manajer menetapkan apa yang dibutuhkan (kriteria) dan apa yang diperbolehkan (pembatas). Dalam kondisi inilah pengambil keputusan siap dalam memilih pemecahan yang optimal ataupun terbaik.

Perpindahan Ibu Kota Negara

Kalimantan Timur dianggap memiliki nilai strategis untuk menjadi pusat perekonomian setara dengan Jakarta dan berada di tengah Indonesia, sehingga pilihan menjadikannya sebagai ibu kota baru Indonesia adalah keputusan yang bijaksana (Herdiana, 2022). Karena lokasinya yang strategis, wilayah ini memiliki potensi untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi internasional dan nasional. Untuk mencapai pemerataan ekonomi, pemindahan ibu kota baru akan memiliki efek urbanisasi awal, seperti yang terlihat di Jakarta (Azpitarte, 2021). Saat para transmigran mulai bermigrasi ke ibu kota baru, lapangan pekerjaan akan terbuka, infrastruktur bisnis akan dibangun, dan transmigran akan bermobilisasi ke ibu kota untuk mencari pekerjaan. Karena itu, kegiatan bisnis akan berjalan secara tidak langsung. Tingkat urbanisasi Pulau Jawa akan menurun sebagai akibat dari pergeseran fokus ke ibu kota baru.

Metode

Metode yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu studi literatur. Dalam penelitian ini penulis menerapkan banyak sumber literatur untuk mendapatkan data penelitian dan menerapkan pendekatan kualitatif sebab data yang didapat berbentuk kata ataupun deskripsi. Studi kepustakaan mempunyai ciri yakni, (1) Peneliti dihadapkan oleh data yang tidak langsung dari lapangan, (2) data pustaka biasanya bersifat sekunder dan bukan data asli dari tangan pertama, serta (3) Data pustaka tak dibatasi dari waktu dan ruang (Zed, 2008). Dalam penelitian ini, informasi dan data didapatkan melalui berbagai sumber referensi seperti buku dan jurnal dengan topik yang relevan. Data yang diambil banyak berasal dari artikel Google Scholar yang kami dapatkan melalui aplikasi Publish or Perish. Kami menggunakan sumber referensi yang sesuai dengan topik penelitian dari jurnal bereputasi. Kemudian, melakukan analisis kembali data yang dikumpulkan sebagai data mentah yang perlu diidentifikasi satu dengan yang lain. Kegiatan analisis meliputi minimalisasi data, visualisasi data, validasi data, dan kesimpulan (Megawati & Mahdiannur, 2021). Jumlah penyaringan artikel yang diperoleh dilaksanakan sesuai dengan kriteria dan mendapat hasil akhir yang didapatkan yaitu hasil dari 11 artikel yang direview.

Kami menggunakan diagram fishbone untuk menganalisis dalam penelitian ini. Diagram sebab akibat, juga disebut sebagai fishbone diagram, ialah satu di antara alat yang seringkali dipergunakan dalam mengidentifikasi dan menganalisis masalah penelitian. Dalam proses pengolahan dan analisis data, diagram ini merupakan salah satu dari tujuh alat kualitas dasar yang sering digunakan oleh peneliti. Dengan bantuan diagram ini,

peneliti dapat menemukan penyebab dari berbagai masalah. Diagram tersebut mempunyai kegunaan dalam menganalisis dan menemukan komponen penting yang mempengaruhi karakteristik kualitas output kerja.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1961, yang juga merupakan peraturan Undang-Undang PNPS No. 2 Tahun 1961, Jakarta secara hukum ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Setelah itu, beberapa Undang-Undang menentukan Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibu Kota (DKI), termasuk UU No. 11 Tahun 1990, UU No. 34 Tahun 1999, dan yang paling baru, UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap berlaku hingga saat ini. Sampai sekatang ini, tidak terdapat undang-undang khusus yang menetapkan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Undang-undang yang berlaku dari tahun 1961 hingga 2007 ialah undang-undang satu-satunya.

Dengan statusnya merupakan ibu kota NKRI dan sebagai daerah otonom di tingkat provinsi, DKI Jakarta sering kali menghadapi banyak masalah. Antara lain ialah urbanisasi, transportasi, keamanan, lingkungan, pengelolaan kawasan khusus, serta masalah sosial kemasyarakatan lainnya. Ini muncul dari berbagai aspek karena Jakarta bukan hanya jadi pusat pemerintahan namun juga pusatnya bisnis, perdagangan, serta jasa keuangan. Dalam konteks "Jabodetabek", Jakarta juga merupakan pusat industri dan budaya. Masyarakat luar kota menarik ke Jakarta karena peluang pekerjaan, pendidikan, dan fasilitas lainnya.

Akibatnya, pada tahun 2022, 10.679.951 orang tinggal di DKI Jakarta. Kepadatan penduduk yang tinggi menyebabkan banyak masalah, seperti kesulitan mengatur layanan publik, kerusakan infrastruktur yang menyebabkan biaya pemeliharaan yang tinggi, kesulitan mengatur penyediaan pekerjaan, yang menyebabkan tingkat kemiskinan meningkat, dan sebagainya. Permasalahan ini dapat berdampak pada bagaimana pemerintah beroperasi (Purnama & Chotib, 2022). Selain itu, keputusan dalam memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan Timur adalah keputusan yang tepat karena tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan berbagai sektor di Indonesia, terutama ekonomi. Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur akan membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam berbagai cara, seperti meningkatkan infrastruktur, memastikan pemerataan pembangunan, meningkatkan sektor pariwisata, dan ekonomi kreatif, serta mengurangi disparitas ekonomi yang ada (Bogousslavsky, 2021).

Pemindahan ibu kota ke IKN harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, karena akan berdampak pada tata masyarakat yang baru dibentuk sebagai Ibu Kota Negara Nusantara. Faktor-faktor seperti ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan harus dipertimbangkan.

Diagram Fishbone

Faktor-faktor yang memengaruhi keputusan untuk memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan diidentifikasi melalui penyusunan diagram fishbone. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor ini, akan lebih mudah untuk mengidentifikasi dampak yang mungkin muncul

sebagai akibat dari pemindahan Ibu Kota tersebut (Mora, 2022). Pada umumnya, diagram fishbone ini digunakan untuk mengidentifikasi penyebab masalah yang kemudian digunakan untuk mengidentifikasi sumber masalah. Analisis akar masalah adalah langkah pertama dalam membuat diagram fishbone ini: (1) mengumpulkan data dengan membaca laporan atau jurnal tentang pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan; (2) menemukan masalah apa saja yang muncul; (3) menemukan akar masalah yang muncul; dan (4) membuat rekomendasi dan menerapkannya. membuat saran untuk perbaikan kepada pihak terkait, dalam hal ini pemerintah.



Gambar 1. Diagram Fishbone.

Aspek Ekonomi

Menteri PPN Bambang Brodjonegoro mengatakan pada Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Ke-4 apabila pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur ialah investasi besar di luar Pulau Jawa yang bertujuan untuk meminimalkan kesenjangan ekonomi antara berbagai daerah di Indonesia (Bappenas, 2019). Menurut pernyataannya, pemerintah telah mengambil tindakan tegas untuk mencapai pemerataan ekonomi di luar Pulau Jawa untuk mencegah perekonomian Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa (Dow, 2021).

Pemerintah melakukan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) karena mereka ingin melihat bagaimana negara lain berhasil mengatasi masalah ketimpangan ekonomi mereka. Indonesia berusaha untuk menerapkan kebijakan tersebut. Pemindahan Ibu Kota Kazakhstan dari Almaty ke Astana adalah awal dari pengalaman keberhasilan ini. Pembangunan Kazakhstan meningkat sebagai akibat dari pemindahan Ibu Kota ini. Di tahun 2017, tingkat kemiskinan menurun dari 46,7% di tahun 2001 jadi 2,5% (PPN/Bappenas, 2020). Dengan penurunan tingkat kemiskinan dan indeks gini, pertumbuhan PDB Kazakhstan jadi lebih stabil.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia ingin mengadopsi kebijakan Kazakhstan yang berhasil. Perekonomian Indonesia diperkirakan terkena dampak langsung dan tidak langsung dari pemindahan IKN. Salah satu dampak langsung adalah peningkatan aktivitas ekonomi yang disebabkan oleh investasi yang dilaksanakan dari pemerintah dan pihak swasta agar mendukung pembangunan infrastruktur dan kegiatan operasional lainnya

selama penyelenggaraan pemerintahan baru di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dampak tidak langsung adalah efek multiplier terhadap perekonomian, yang akan menghasilkan peningkatan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan pendapatan. Akibatnya, dampak pemindahan IKN secara keseluruhan akan meningkatkan PDB dan kesejahteraan masyarakat (Statistik, 2024).

Tabel 1: Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Pulau

Wilayah	Kontribusi PDRB (%)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
Sumatera	22,01%	4,69%
Kalimantan	8,49%	5,43%
Sulawesi	7,01%	6,37%
Maluku & Papua	2,58%	6,94%
Jawa	57,05%	4,96%

Tabel di atas menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan energi di Kalimantan, termasuk batu bara, gas, dan komoditas tambang lainnya, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan produksi dan harga komoditas ekspor tambang dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB dan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan. Faktor pendukung lainnya adalah peningkatan investasi dalam pembangunan infrastruktur di Kalimantan. Infrastruktur yang baik dapat memperkuat hubungan antara wilayah dan memudahkan pendistribusian barang dan jasa. lebih dari kebijakan pemerintah yang mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi Kalimantan. Selain itu, pemindahan ibu kota negara ini dapat mempercepat proses perizinan, yang dapat mendorong pertumbuhan sektor ekonomi.

Aspek Sosial

Mengingat bahwa pelaku komuter yang bekerja di bidang swasta lebih banyak daripada di sektor pemerintahan, berdampak sosial dari arus migrasi akibat perilaku komuter yang tinggal di Jawa Barat serta bekerja di DKI Jakarta terus tetap tersedia sekalipun sebagian dari PNS pusat pindah ke ibu kota baru. Pekerja pelaku komuter tak mempunyai banyak waktu senggang dalam bersosialisasi bersama masyarakat sekitarnya karena jadwal pulang pergi yang panjang dari tempat kerja mereka. Tingkat kohesi sosial yang rendah pada daerah pinggiran Jakarta ditunjukkan oleh rasa tidak peduli orang-orang di lingkungan tempat tinggal mereka (Ningrum et al., 2021).

Perencanaan pemindahan IKN otomatis pasti diikuti melalui terdapat pemindahan manusia. Masyarakat baru itu hendak melakukan interaksi pada lingkungan baru dan masyarakat asli hingga akan hadir tantangan sosial. Masyarakat pendatang akan jadi

minoritas. Tetapi semakin lama memungkinkan supaya mendominasi kegiatan di lokasi IKN itu. Maka demikian, sebelum adanya permasalahan sosial, dibutuhkan terdapat upaya memitigasi penanggulangan. Upaya itu di antaranya penguatan masyarakat asli, integrasi masyarakat asli dengan pendatang dan menaikkan pemahaman terkait kelestarian lingkungan. Pemenuhan kebutuhan ekonomi, misalnya memanfaatkan bahan baku lokal yang memiliki wawasan lingkungan, penguatan ekonomi masyarakat asli, yang sebagian besar terdiri dari masyarakat dengan penghasilan rendah, serta penguatan kelembagaan sosial, misalnya forum lintas agama, sangat penting untuk mencapai hal ini.

Wilayah Provinsi Kalimantan Timur relatif aman dari masalah sosial dan konflik suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) karena mayoritas penduduknya adalah pendatang. Migrasi massal penduduk, yang mayoritas ialah aparatur sipil negara (ASN) pusat, adalah satu-satunya hal yang perlu dinilai dan diukur sebagai konsekuensi dari penetapan Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara (Conyers, 1994). Untuk mengurangi perbedaan dan menciptakan lingkungan yang toleran pasca Provinsi Kalimantan Timur merupakan ibu kota negara, pemerintah daerah menggandeng aparat sudah melaksanakan sosialisasi pemindahan ibu kota negara pada tokoh, ketua adat serta masyarakat lokal (Purnama & Chotib, 2022).

Aspek Politik

Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur dianggap sesuai dengan pengelolaan pemerintahan dan tujuan pengembangan masa mendatang. Supaya mewujudkan model pengelolaan pemerintahan yang seperti itu, berbagai hal yang harus didukung untuk mendukung tujuan politik pemerintah tidak mengesampingkan mengabaikan aspek aturan hukum, seperti: 1) kesiapan lahan pemukiman dan tata ruang wilayah kota (masterplan dan desain tata ruang); 2) kesiapan sumber daya manusia (SDM) pendukung; 3) perhatian terhadap aspek sosial budaya, terutama yang berkaitan dengan kearifan lokal setempat di wilayah Kalimantan Timur; 4) masalah keamanan; dan 5) aspek sehari-hari (Kementerian PPN/Bappenas, 2020).

Tidak ada klausul dalam peraturan perundang-undangan yang menunjukkan bahwa pembangunan diprioritaskan hanya untuk ibukota Jakarta ataupun berbagai daerah di luar pulau Jawa. Sebaliknya, kecenderungannya lebih terkait dengan keinginan politik pemerintah dan negara untuk secara sungguh-sungguh menyebarkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ke luar pulau Jawa. (Wiwoho, 2017). Selain menunjukkan keinginan untuk terwujudnya pemerataan pembangunan dengan langsung, dasar pemindahan ibukota juga menunjukkan apabila negara gagal membangun Jakarta sebagai ibukota yang bisa membuat kebijakan pembangunan yang adil. Tidak diragukan lagi, pembangunan telah terjadi di luar pulau Jawa, sekalipun tak begitu cepat seperti di pulau Jawa (Herdiana, 2022).

Aspek Lingkungan

Tidak ada klausul dalam peraturan perundang-undangan yang menunjukkan bahwa pembangunan diprioritaskan hanya untuk ibukota Jakarta ataupun berbagai daerah

di luar pulau Jawa. Sebaliknya, kecenderungannya lebih terkait dengan keinginan politik pemerintah dan negara untuk secara sungguh-sungguh menyebarkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ke luar pulau Jawa (Wiwoho, 2017). Selain menunjukkan keinginan untuk terwujudnya pemerataan pembangunan dengan langsung, dasar pemindahan ibukota juga menunjukkan apabila negara gagal membangun Jakarta sebagai ibukota yang bisa membuat kebijakan pembangunan yang adil. Tidak diragukan lagi, pembangunan telah terjadi di luar pulau Jawa, sekalipun tak begitu cepat seperti di pulau Jawa (Herdiana, 2022). Pemindahan Ibu Kota Nusantara ke Kalimantan dapat mengakibatkan munculnya dampak terhadap lingkungan yang akan terjadi. Berbagai opini masyarakat muncul bahwa pemindahan Ibu Kota ke IKN akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan karena potensi deforestasi dan kerusakan habitat yang luas. Pemindahan IKN akan mengganggu habitat flora dan fauna, merusak keanekaragaman hayati, serta merusak kawasan hutan. Sebagaimana yang diketahui letaknya IKN yang ada dalam kawasan hutan konservasi Taman Hutan Rakyat Bukit Suharto, Hutan Lindung Sungai Wain, dan Hutan Lindung Manggar dimana akan mengakibatkan ketersediaan sumber air terancam hingga berakibat pada krisis air yang terjadi di kawasan lindung dan konservasi Teluk Balikpapan (Muhlashin, 2023). Selain itu dengan adanya pembangunan infrastruktur di kawasan konservasi tersebut bisa mengakibatkan degradasi flora. Hutan konservasi yang akan dibuka akan menimbulkan hilangnya habitat bagi flora dan fauna khas daerah.

Pembangunan infrastruktur di kawasan IKN membuat berbagai kapal besar pengangkut bahan melewati Teluk Balikpapan. Teluk Balikpapan sendiri merupakan jalur akses konstruksi dan distribusi barang menuju kawasan IKN. Hal ini menyebabkan flora dan fauna yang ada di kawasan Teluk Balikpapan terancam keberadaannya dikarenakan aktivitas yang berlebih pada area tersebut. Kondisi tersebut senada dengan pernyataan Mapaselle yang dikutip dalam (Kuswantoro, 2024) bahwa kondisi ekosistem Teluk Balikpapan mengalami kerusakan akibat masuknya industri ke wilayah tersebut. Dampak lain yang muncul yaitu kondisi ekosistem terumbu karang khususnya mangrove mengalami kerusakan hingga saat ini.

Berdasarkan laporan Bappenas yang dikutip dalam (Ika, 2023) kondisi hutan di kawasan IKN terlihat kurang baik. Dari total 256.000 hektar lahan tanah, hanya 43% yang merupakan hutan asli. Dimana hal ini dapat dikatakan deforestasi terjadi signifikan di kawasan tersebut sejumlah 57% kawasan hutan. Kondisi ini seharusnya memerlukan perhatian khusus untuk dapat meningkatkan forest recovery. Kondisi hutan produksi yang dicanangkan sebagai pengganti hutan hujan tropis yang ada di Kalimantan belum tentu mampu untuk mensuplai oksigen, biodiversitas, serta mempertahankan ekosistem yang telah terbentuk dari hutan kawasan Kalimantan Timur sebelumnya.

Kesimpulan

Berdasarkan Root Cause Analysis melalui pendekatan Fishbone Analysis terkait pengambilan keputusan pemindahan Ibu kota ke IKN didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bambang Brodjonegoro memuji inisiatif pemerintah Indonesia untuk berinvestasi di Kalimantan timur, khususnya industri. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk mengurangi kesenjangan di berbagai wilayah Indonesia. Stabilitasnya PDRB Kazakhstan dan meningkatnya kontribusi PDRB Kalimantan berdampak pada pemilihan pemerintah untuk berinvestasi di Kalimantan. Pertumbuhan ekonomi yang signifikan di Kalimantan juga dikaitkan dengan program IKN, kemajuan ekonomi, peningkatan produksi dan ekspor impor merupakan upaya pemerintah untuk berinvestasi dan mengembangkan perekonomian Kalimantan.
2. Satu di antara lembaga negara yang memiliki peranan penting untuk menanggulangi permasalahan sosial pada sektor pemerintah ialah ASN. Supaya meminimalisir ketegangan sosial, ASN bertugas melakukan koordinasi dengan masyarakat dan memastikan interaksi terjadi ditengah masyarakat. Kalimantan Timur, sebagian besar masyarakatnya terlibat dalam perjuangan keadilan sosial, ASN merupakan bagian penting dalam penyelesaian permasalahan sosial.
3. Demi mewujudkan model pemerintahan yang bertujuan pada pengembangan masa depan, terdapat sejumlah faktor yang perlu menjadi pertimbangan guna mendukung tujuan politik pemerintah tanpa melanggar ketentuan hukum. Adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan tindakan legislasi tidak mampu mengangkat aspirasi masyarakat luas. UU terkait IKN dianggap tidak aspiratif karena tidak dirundingkan dengan masyarakat luas sehingga banyak menimbulkan keluhan.
4. Pemandangan IKN akan merusak keanekaragaman hayati, merusak kawasan hutan, dan mengganggu habitat flora dan fauna. Selain itu, kehadiran pembangunan infrastruktur di kawasan konservasi kemungkinan besar akan berkontribusi terhadap degradasi flora. Kondisi Teluk Balikpapan juga menjadi akibat dari masuknya industri ke wilayah yang terkena dampak.

Dari berbagai faktor penyebab pemindahan Ibukota ke Kalimantan, berdasarkan hasil uraian peneliti menggunakan Fishbone Analysis diharapkan pemindahan Ibukota ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan infrastruktur dan layanan publik di Kalimantan, serta dapat menjadi langkah strategis dalam mengurangi beban Jakarta sebagai pusat administrasi. Namun, disisi lain pemindahan ini juga memerlukan perencanaan yang matang, pengelolaan yang baik, dan partisipasi aktif dari berbagai stakeholder untuk meminimalisir dampak negatif yang terjadi.

Daftar Pustaka

- Absor, M., Mubarrak, M., & others. (2023). Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi Sosial. *Jurnal Adijaya*, 01(05), 1052–1063. <http://e-journal.naureendigiton.com/index.php/jam/article/view/868>
- Ahmed, Z. (2020). Moving towards a sustainable environment: The dynamic linkage between natural resources, human capital, urbanization, economic growth, and ecological footprint in China. *Resources Policy*, 67. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2020.101677>

- Aji, G., Arfani, Z., Sari, A. M., Seprtiani, R., & Abdurrahman Wahid, U. K. H. (2023). Dampak Pemindahan Ibukota Negara Baru terhadap Ekonomi dan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(5), 2985–5624. <http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura>
- Azpitarte, F. (2021). Socio-economic groups moving apart: An analysis of recent trends in residential segregation in Australia's main capital cities. *Population, Space and Place*, 27(3). <https://doi.org/10.1002/psp.2399>
- Bappenas. (2019). *Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara, Menteri Bambang Paparkan Investasi dan Strategi Pembiayaan*.
- Bogousslavsky, V. (2021). Slow-moving capital and execution costs: Evidence from a major trading glitch. *Journal of Financial Economics*, 139(3), 922–949. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2020.08.009>
- Conyers, D. (1994). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Gadjah Mada University Press.
- Dong, M. (2022). Moving toward the expected credit loss model under IFRS 9: capital transitional arrangement and bank systematic risk. *Accounting and Business Research*, 52(6), 641–679. <https://doi.org/10.1080/00014788.2021.1952060>
- Dow, J. (2021). Hysteresis in price efficiency and the economics of slow-moving capital. *Review of Financial Studies*, 34(6), 2857–2909. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhaa110>
- Hadi, F., & Ristawati, R. (2020). Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 17(3), 530–557. <https://doi.org/10.31078/jk1734>
- Hasibuan, R. R. A., & Aisa, S. (2020). Dampak Dan Resiko Perpindahan Ibu Kota Terhadap Ekonomi di Indonesia. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 183. <https://doi.org/10.30829/ajei.v5i1.7947>
- Herdiana, D. (2022). Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Transformative*, 8(1), 1–30. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2022.008.01.1>
- Ika. (2023). *IKN Merusak Paru-Paru Dunia?*
- Kuswanto. (2024). *Walhi dan Pokja Pesisir Kaltim: Teluk Balikpapan Rusak akibat Pembangunan IKN*.
- Malliaris, S. (2021). Reputation Concerns and Slow-Moving Capital. *Review of Asset Pricing Studies*, 11(3), 580–609. <https://doi.org/10.1093/rapstu/raab006>
- Megawati, S., & Mahdiannur, M. A. (2021). Implementation of Forest Conservation Policies based on Local Wisdom of the Ammatoa Kajang Indigenous Community. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 940(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/940/1/012082>
- Mora, A. (2022). Discussion of 'Moving toward the expected credit loss model under IFRS 9: Capital Transitional Arrangement and bank systematic risk''. *Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1080/00014788.2022.2027078>

- Muhlashin, I. (2023). Analisis Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara Berpotensi Melanggar Uu No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Hukum Dan Keadilan*, 10(2), 1–11.
- Ningrum, J., Jamalludin, J., Nafiah, I., Sitorus, F. M., Rari, F. P., & Maryamah, I. S. (2021). Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara Terhadap Penduduk Dan Ketenagakerjaan Di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 15(2), 133. <https://doi.org/10.14203/jki.v15i2.492>
- PPN/Bappenas, K. (2020). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara*.
- Purnama, S., & Chotib. (2022). Analisis Kelayakan Pendirian Usaha Pengolahan Limbah Medis untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 13(1), 57–70. <https://doi.org/10.22212/jekp.v13i1.2155>
- Reading, A. (2021). Moving hearts: How mnemonic labour (trans)forms mnemonic capital. *Memory Studies*, 14(1), 95–111. <https://doi.org/10.1177/1750698020976465>
- Sahamony, A. A., Muta'ali, L., & Mei, E. T. W. M. (2020). Tinjauan Geografis Wilayah Potensial Ibukota Negara Indonesia. *Jurnal Teknosains*, 10(1), 86. <https://doi.org/10.22146/teknosains.36756>
- Silahahi, S. (2019). Dampak Ekonomi Dan Sosial. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, XI (16). <https://rspo.org/id/why-sustainable-palm-oil-economic-and-social-impact/>
- Statistik, B. P. (2024). *Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2023 Tumbuh 5,04 Persen*.
- Sudjiman, P. E. S., & S., L. (2018). Komputer Dalam Proses Pengambilan Keputusan. *Jurnal TelKa*, 8, 55–67. <https://jurnal.unai.edu/index.php/teika/article/view/2327>
- Taufiq, M. (2020). Pemindahan Ibu Kota Dan Potensi Konektivitas Pemerataan Ekonomi. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 8(1). <https://doi.org/10.7454/jvi.v8i1.156>
- Wind, T. R. (2019). Social capital interventions in public health: Moving towards why social capital matters for health. *Journal of Epidemiology and Community Health*, 73(9), 793–795. <https://doi.org/10.1136/jech-2018-211576>
- Wiwoho, B. (2017). *Beda Gaya Jokowi "Daripada" Soeharto Membangun Infrastruktur*.
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.